



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM  
**SUB UNIT KERJA** : ANGGOTA 1

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WAHJOE TRIWIDIJO KOENTJORO
2. Jabatan : ANGGOTA (1) DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM
3. NHK : 66523

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m<sup>2</sup>/130 m<sup>2</sup> di KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
3. Tanah Seluas 4832 m<sup>2</sup> di TULUNGAGUNG, WARISAN Rp. 1.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 260.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 114.250.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 569.500.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 5.343.750.000**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 5.343.750.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.